**KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut regulasi yang terkait, maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan pelaporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Prabumulih, 2021  WALIKOTA PRABUMULIH,  **H. RIDHO YAHYA** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| *Tujuan Penyusunan LaporanKeuangan*  *Realisasi*  *Pendapatan LRA*  *Rp*972.242.373.625,39  *Realisasi Belanja*  *Rp*1.024.031.018.357,66  *Realisasi Transfer*  *Rp30.320.916.918,00*  *Realisasi Pembiayaan*  *Netto*  *Rp171.866.820.389,63*  *SILPA*  *Rp89.757.258.739,36*  *SAL Awal*  *Rp171.866.820.389,63*  *SAL Akhir*  *Rp*89.757.258.739,36  *Jumlah Aset Rp*2.633.860.508.464,40  *Jumlah Kewajiban Rp24.505.424.468,50*  *Jumlah Ekuitas*  Rp2.609.355.083.995,90  *Realisasi*  *Pendapatan LO*  *Rp*973.481.319.021,58  *Realisasi Beban*  *Rp*946.594.263.798,28  *Defisit LO*  *(Rp*19.826.199.776,70*)*  *Laporan Arus Kas (*Rp89.757.216.580,36*)*  *Ekuitas Awal*  *Rp2.480.243.940.512,61*  *Ekuitas Akhir*  *Rp*2.609.355.083.995,90  *Penyajian LRA*  *PenyajianNeraca* | **RINGKASAN EKSEKUTIF**  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.   * 1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**   Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun berjalan dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Realisasi Pendapatan LRA pada TA 2020 adalah sebesar Rp972.242.373.625,39 atau mencapai 102,68% dari anggarannya sebesar Rp946.853.077.993,00. Dari realisasi tersebut, Pendapatan dari PAD terealisasi sebesar Rp85.037.055.386,71 atau 84,01% dari anggaran Rp101.219.000.000,00. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp859.882.828.238,68 atau 105,01% dari anggaran Rp818.829.277.993,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp27.322.490.000,00 atau 101,93% dari anggaran Rp26.804.800.000,00.  Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp1.024.031.018.357,66 atau mencapai 93,62% dari anggarannya sebesar Rp1.093.764.628.464,00. Dari realisasi tersebut, Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp756.561.301.247,00 atau 92,63% dari anggaran Rp816.732.781.105,00; Belanja Modal terealisasi sebesar Rp220.756.462.110,66 atau 96,41% dari anggaran Rp228.968.408.359.00 ; sedangkan Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp46.713.255.000,00 atau 97,19% dari anggaranRp48.063.439.000,00.  Realisasi Transfer pada TA 2020 adalah sebesar Rp30.320.916.918,00 atau mencapai 121,50% dari anggarannya sebesar Rp24.955.269.918,00. Dari realisasi tersebut, Bantuan Keuangan Ke Desa terealisasi sebesar Rp29.382.215.000,00 atau 122,34% dari anggaran Rp24.016.568.000,00 dan Bantuan Keuangan Ke Partai Politik terealisasi sebesar Rp938.701.918,00 atau 100% dari anggaran Rp938.701.918,00.  Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2020 adalah sebesar Rp171.866.820.389,63 atau 100,00% dari anggaran Rp171.866.820.389,00. Dari realisasi diatas, Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp171.866.820.389,63 yang berasal dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya (tahun 2019) dan Pengeluaran Pembiayaan tidak ada realisasi di TA 2020.  SILPA TA 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 atau mengalami penurunan 47,77% yaitu sebesar Rp82.109.561.650,27 dari SILPA TA 2019 sebesar Rp171.866.820.389,63**.**   * 1. **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  SAL Awal TA 2020 sebesar Rp171.866.820.389,63 atau meningkat 29,45% yaitu sebesar Rp39.097.622.525,25 dari SAL Awal tahun 2019 sebesar Rp132.769.197.864,38.  Terdapat penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp171.866.820.389,63**.** SiLPA TA 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 atau mengalami penurunan 47,77% yaitu sebesar Rp82.109.561.650,27 dari SILPA TA 2019 sebesar Rp171.866.820.389,63  SAL Akhir TA 2020 sebesar Rp89.757.258.739,36 atau mengalami penurunan 47,77% yaitu sebesar Rp82.109.561.650,27 dari SILPA TA 2019 sebesar Rp171.866.820.389,63   * 1. **NERACA**   Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun berjalan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan.  Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.633.860.508.464,40 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp161.148.017.787,33; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp67.487.436.703,25; Aset Tetap sebesar Rp2.368.980.508.106,80; dan Aset Lainnya sebesar Rp36.244.545.867,02.    Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah Rp24.505.424.468,50.  Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.609.355.083.995,90.     * 1. **LAPORAN OPERASIONAL**   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.  Realisasi Pendapatan LO pada TA 2020 adalah sebesar Rp973.481.319.021,58 terdiri dari Pendapatan dari PAD sebesar Rp88.032.563.044,90; Pendapatan Transfer sebesar Rp850.314.822.093,68; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp35.133.933.883,00.  Realisasi Beban pada TA 2020 adalah sebesar Rp946.594.263.798,28 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp391.710.256.673,00; Beban Persediaan sebesar Rp63.895.281.935,96; Beban Jasa sebesar Rp154.443.805.442,61; Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.807.231.931,00; Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp88.661.054.992,52; Beban Hibah sebesar Rp53.595.876.685,00; Beban Bantuan Sosial sebesar Rp165.000.000,00; Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp2.678.889.199,35; Beban Penyusutan sebesar Rp162.982.115.520,74; Beban Amortisasi sebesar Rp474.692.939,63; Beban Lain-lain sebesar Rp8.727.476.560,47; Bantuan Keuangan Ke Desa sebesar Rp7.513.880.000,00 dan Bantuan Keuangan Ke Partai Politik sebesar Rp938.701.918,00.  Terdapat Beban Luar Biasa pada Pos Luar Biasa sebesar minus Rp46.713.255.000,00 di TA 2020.  LO mengalami Defisit TA 2020 sebesar negatif Rp19.826.199.776,70 atau turun sebesar negatif Rp32.064.047.442,21 dibandingkan Surplus LO TA 2019 sebesar Rp51.890.247.218,91.   * 1. **LAPORAN ARUS KAS**   Laporan Arus Kas menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode. Arus kas ini terdiri dari aru skas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, serta arus kas dari aktivitas transitoris.  Kas bersih TA 2020 mengalami penurunan sebesar negatif Rp89.757.216.580,36yang terdiri dari arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp138.646.900.460,39 ; arus kas bersih dari Aktivitas Investasi sebesar negatif Rp220.756.462.110,66; arus kas bersih dari dari Akrivitas Transitoris sebesar negatif Rp42,159,00 dan Tidak terdapat arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan.   * 1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Ekuitas Awal TA 2020 sebesar Rp2.480.243.940.512,61 atau naik 2,31% yaitu sebesar Rp55.974.982.040,91 dari Ekuitas Awal TA 2019 sebesar Rp2.424.268.958.471,70.  Terjadi Defisit LO sebesar negatif Rp19.826.199.776,70 atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca dan koreksi ekuitas sebesar negaif Rp148.937.343.259,99 yang juga mengurangi Ekuitas.  Ekuitas Akhir TA 2020 sebesar Rp2.609.355.083.995,90 atau turun 5,20% yaitu sebesar Rp129.111.143.483,29 dari Ekuitas Akhir TA 2019 sebesar Rp2.480.243.940.512,61**.**   * 1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.  Dalam penyajian Laporan Realisas Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.  Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kasditerima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. |
|  | WALIKOTA PRABUMULIH  **H. RIDHO YAHYA** |
|  |  |

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**WALIKOTA PRABUMULIH**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Prabumulih, 2021 |

WALIKOTA PRABUMULIH,

**H. RIDHO YAHYA**